



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK**

**RENCANA KERJA  
2026**

**SEKRETARIAT DPRD**

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat Rahmat dan Karunianya, Alhamdulillah kami Sekretariat DPRD telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang telah disusun dan disajikan sebagai penjabaran dari program – program yang ada di Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan pelaksanaan Renstra dalam jangka pendek (1 Tahun) untuk menyelaraskan dan menyinkronisasikan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan Renstra 2021 – 2026. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk menyinkronkan Program/Kegiatan Tahun 2026 dengan Rencana Strategis 2021 – 2026, sehingga program dan kegiatan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 ini tidak menyimpang dari RENSTRA.

Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan dilingkungan Sekretariat DPRD.

Arosuka, 2025  
**SEKRETARIS DPRD,**



**Drs. ZAITUL IKHLAS, AP, M.Si**  
NIP. 19731125 199402 1 001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang .....        | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum .....        | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....     | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan ..... | 4 |

### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah..... | 5  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                                  | 25 |
| 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                                          | 27 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                                          | 28 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                                            | 28 |

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....            | 30 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ... | 31 |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                            | 31 |

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

34

### BAB V PENUTUP .....

41

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub. kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta RKPD. Hal ini untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, diharapkan Rencana Kerja ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan/sub kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas.

Sekretariat DPRD Kabupaten Solok sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Solok diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2026. Perumusan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk tahun 2026 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ini akan dijadikan sebagai acuan

dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 selanjutnya.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 220);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
22. Peraturan Bupati Solok Nomor ...Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dimaksud untuk :

- a. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun ke depan;
- b. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan;
- c. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Bupati yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari tugas-tugas kepada Bupati;
- d. Rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya; dan
- e. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tujuan menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2026 adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi secara optimal kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta hak dan kewajibannya;
- b. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan; dan
- d. Tercapainya suasana kondusif dalam penyelenggaraan rapat-rapat kegiatan DPRD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I     PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum



|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan                                                                                             |
|         | 1.4 Sistematika Penulisan                                                                                         |
| BAB II  | HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU                                                          |
|         | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah |
|         | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                                                                   |
|         | 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                             |
|         | 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD                                                                           |
|         | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat                                                             |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH                                                                               |
|         | 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional                                                                          |
|         | 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah                                                             |
|         | 3.3 Program dan Kegiatan                                                                                          |
| BAB IV  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH                                                                      |
| BAB V   | PENUTUP                                                                                                           |

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

---

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Kinerja OPD diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program dan kegiatan, dimana untuk mengetahui gambaran tingkat capaian sasaran program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi indikator sasaran, capaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024. Evaluasi ini memuat tentang realisasi dari program dan kegiatan yang tidak memenuhi maupun melebihi target kinerja serta faktor yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi acuan dalam implementasi pencapaian target dari Renstra Sekretariat DPRD dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.

Hasil Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun lalu dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel TC.29:

Tabel TC.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2025 Kabupaten Solok

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

| Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (out come)/<br>kegiatan (Output) | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra SKPD)<br>Tahun 2021 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>kegiatan<br>s/d<br>dengan<br>Tahun<br>(n-3)<br>2023 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                         |                             | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(RENJA<br>SKPD<br>Tahun<br>n-1)<br>2025 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra SKPD s/d<br>tahun Berjalan                              |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      |                                                               |                                                                      |                                                                                                                              | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah (n-<br>2) 2024                    | Realisasi<br>Renja<br>Perangk<br>at<br>Daerah<br>tahun<br>(n-2)<br>2024 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                                 | Realisasi<br>Capaian<br>Program<br>Dan<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(tahun<br>n-1)<br>2025 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                    | 3                                                             | 4                                                                    | 5                                                                                                                            | 6                                                                        | 7                                                                       | 8 = (7/6)                   | 9                                                                               | 10 =<br>(5+7+9)                                                                                          | 11 =<br>(10/4)                                              |
| 01   | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KAB/KOTA | Persentase<br>Pemenuhan Layanan<br>Sekretariat                | 100%                                                                 | 96.97%                                                                                                                       | 100%                                                                     | 99.46%                                                                  | 95.54%                      | 100%                                                                            | 98.81%                                                                                                   | 423.72%                                                     |



|              |                                                                   |                                                                      |    |         |    |      |      |      |      |      |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------|------|------|------|------|---------|
| 01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan DPRD | 56 | Dokumen | 61 | 60   | 61   | 102% | 60   | 182  | 325%    |
| 01.1.02.0008 | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran      | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 26 | Dokumen | 26 | 26   | 26   | 100% | 26   | 78   | 300%    |
| 01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    |    | 100%    |    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%      |
| 01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD           | -  | Laporan | -  | -    | -    | 0%   | -    | -    | 0%      |
| 01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia   |    | 100%    |    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 341.58% |
| 01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaiat Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaiat Dinas berserta Atribut Kelengkapannya           | 10 | Paket   | 10 | 10   | 10   | 100% | 12   | 32   | 320%    |
| 01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian    | -  | Dokumen | -  | -    | -    | 0%   | -    | 0    | 0%      |

|              |                                                                  |                                                                                        |     |         |         |      |      |      |      |      |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|
| DL.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                   | -   | Orang   | -       | -    | -    | 0%   | -    | 0    | 0%    |
| 01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan       | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 19  | Orang   | 22      | 24   | 24   | 100% | 23   | 69   | 363%  |
| 01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia                            | 100 | %       | 100.00% | 100% | 100% | 90%  | 100% | 100% | 722%  |
| 01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan     | 4   | Paket   | 3       | 4    | 2    | 50%  | 3    | 8    | 200%  |
| 01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                         | 4   | Paket   | 3       | 10   | 10   | 100% | 3    | 15   | 400%  |
| 01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                     | 7   | Paket   | 4       | 5    | 4    | 80%  | 4    | 12   | 171%  |
| 01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                              | 1   | Paket   | 4       | 10   | 10   | 100% | 1    | 15   | 1500% |
| 01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan           | 1   | Dokumen | 20      | 1    | 1    | 100% | 1    | 22   | 2200% |

|              |                                                                    |                                                                                             |         |         |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 01.1.06.0008 | Facilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | 12      | Laporan | 12   | 12   | 12   | 100% | 12   | 36   | 300%  |
| 01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 12      | Laporan | 12   | 12   | 12   | 100% | 10   | 34   | 283%  |
| 01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 100.00% | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 878%  |
| 01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan atau Perorangan                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan         | -       | Unit    | 3    | 3    | 3    | 100% | -    | 3    | 100%  |
| 01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                       | -       | Unit    | -    | -    | -    | 0%   | -    | 0    | 0%    |
| 01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan        | 1       | Unit    | 9    | 8    | 8    | 100% | 219  | 228  | 2633% |

| 01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | Persentase Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia                                              | 100% | 100%    | 100%   | 100% | 100%   | 100%   | 100% | 100% | 733%    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|--------|------|------|---------|
| 01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1    | Laporan | 1      | 1    | 1      | 100%   | 1    | 3    | 300%    |
| 01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 1    | Laporan | 12     | 1    | 1      | 100%   | 3    | 16   | 1600%   |
| 01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 1    | Laporan | 1      | 1    | 1      | 100%   | 1    | 3    | 300%    |
| 01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi      | 100  | %       | 96.67% | 100% | 96.67% | 84.48% | 100% | 100% | 422.50% |
| 01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pejaknya | 2    | Unit    | 2      | 3    | 3      | 100%   | 4    | 9    | 450%    |
| 01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 6    | Unit    | 2      | 1    | 1      | 100%   | 6    | 9    | 150%    |

|              |                                                                                      |                                                                                                 |     |              |        |      |        |        |      |      |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|------|--------|--------|------|------|---------|
| 01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                   | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                    | -   | Unit         | -      | -    | -      | 0%     | -    | 0    | 0%      |
| 01.1.09.0009 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                        | 1   | Unit         | 1      | 2    | 2      | 100%   | 2    | 5    | 500%    |
| 01.1.09.0010 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 10  | Unit         | 13     | 29   | 11     | 37.93% | 35   | 59   | 590%    |
| 01.1.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                              | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang tersedia                                | 100 | %            | 90.48% | 100% | 90.48% | 83.33% | 100% | 100% | 334.29% |
| 01.1.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                           | Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD                                             | 35  | Orang/ Bulan | 35     | 35   | 35     | 100%   | 35   | 105  | 300%    |
| 01.1.15.0002 | Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD                                             | Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan                                      | 3   | Paket        | 6      | 3    | 3      | 100%   | 6    | 15   | 500%    |
| 01.1.15.0003 | Pelaksanaan Medical Cek- Up DPRD                                                     | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Cek-Up DPRD                                                 | 35  | Orang        | 25     | 22   | 11     | 50.00% | 35   | 71   | 203%    |



|              |                                                                      |                                                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                            | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | -    | Dokumen | 3    | 1    | 0    | 0%   | 1    | 4    | 0%   |
| 02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 1    | Dokumen | 1    | 2    | 1    | 50%  | 2    | 4    | 400% |
| 02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                          | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 1    | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | -    | 2    | 100% |
| 2.1.02       | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                        | Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana                                              | 100% | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 1    | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 1    | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.02.0003 | Pembahasan APBD                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  | 1    | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                        | 1    | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                       | -    | Dokumen | -    | -    | -    | 0%   | -    | -    | 0%   |

|              |                                                                     |                                                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 02.1.02.0006 | Pembahasan<br>Pertanggungjawaban<br>in APBD                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan<br>Pertanggungjawaban<br>APBD                            | 1    | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.03      | Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                       | Persentase<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah yang<br>terlaksana                | 100% | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan<br>Pemerintah Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintah bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum | 1    | Laporan | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.03.0002 | Pengawasan Urusan<br>Pemerintah Bidang<br>Infrastruktur             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan bidang<br>Infrastruktur           | 1    | Laporan | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.03.0003 | Pengawasan Urusan<br>Pemerintah Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat    | 1    | Laporan | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.03.0004 | Pengawasan Urusan<br>Pemerintah Bidang<br>Perekonomian              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian            | 1    | Laporan | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.03.0005 | Pengawasan Urusan<br>Pemerintah Bidang<br>Sumber Daya Alam          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Sumber Daya Alam        | 1    | Laporan | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |

|              |                                                                                           |                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 02.1.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1       | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 1       | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 2    | 4    | 400% |
| 02.1.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1       | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana                                                          | 100.00% | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 02.1.04.0001 | Orientasi DPRD                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                                            | 1       | Dokumen | 1    | 1    | 1    | 100% | -    | 1    | 100% |
| 02.1.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 5       | Dokumen | 6    | 6    | 6    | 100% | 4    | 16   | 400% |
| 02.1.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                 | 3       | Orang   | 2    | 2    | 2    | 100% | 3    | 8    | 267% |
| 02.1.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Praksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Praksi                                                                                      | 8       | Orang   | 8    | 8    | 8    | 100% | 8    | 24   | 300% |
| 02.1.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 2       | Dokumen | 2    | 2    | 2    | 100% | 2    | 6    | 100% |

|              |                                                 |                                                                      |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| 02.1.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                    | 1    | Dokumen | 1      | 1    | 1      | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                  | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                        | 41   | Dokumen | 41     | 41   | 41     | 100% | 41   | 123  | 324% |
| 02.1.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat           | 100  | %       | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 02.1.05.0001 | Kunjungan Kerja Dalam Daerah                    | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                            | 3    | Laporan | 3      | 4    | 4      | 100% | 3    | 10   | 333% |
| 02.1.05.0002 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD             | Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun                 | 1    | Dokumen | 1      | 1    | 1      | 100% | 1    | 3    | 300% |
| 02.1.05.0003 | Pelaksanaan Rases                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rases                               | 3    | Dokumen | 3      | 2    | 2      | 100% | 2    | 7    | 233% |
| 02.1.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana | 100% |         | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 02.1.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                              | 1    | Dokumen | 2,00   | 2    | 2      | 100% | -    | 4    | 400% |

|              |                                                                     |                                                                                                     |      |         |        |      |        |        |      |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 02.1.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                      | 1    | Laporan | 3      | 3    | 3      | 100%   | 2    | 6    | 800% |
| 02.1.07      | Pembahasan Kerjasama Daerah                                         | Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yang terlaksana                                              | 100  | %       | 0%     | 0%   | 0%     | 0%     | 0%   | 0%   | 0%   |
| 02.1.07.0001 | Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | -    | Dokumen | -      | -    | -      | 0%     | -    | -    | 0%   |
| 02.1.08      | Facilitasi Tugas DPRD                                               | Persentase Facilitasi Tugas DPRD yang terlaksana                                                    | 100% | 100%    | 94.23% | 100% | 94.23% | 95.00% | 100% | 100% | 100% |
| 02.1.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                               | 29   | Dokumen | 16     | 18   | 16     | 100%   | 11   | 45   | 155% |
| 02.1.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                     | Jumlah Laporan Praksi, Alat Kelengkapan Kinerja DPRD yang disusun                                   | 3    | Laporan | 3      | 3    | 3      | 100%   | 3    | 9    | 300% |
| 02.1.08.0003 | Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                       | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                  | 15   | Dokumen | 10     | 10   | 8      | 80.00% | 10   | 28   | 187% |

|              |                                |                                                           |   |         |    |    |    |               |    |    |      |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|----|----|----|---------------|----|----|------|
| 02.1.08.0004 | Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil<br>Facilitasi Tugas<br>Pimpinan DPRD | 6 | Dokumen | 21 | 21 | 21 | 100%          | 15 | 57 | 950% |
|              | <b>TOTAL</b>                   |                                                           |   |         |    |    |    | <b>95.75%</b> |    |    |      |

Sekretaris DPRD



**Dm. ZAITUL IKHLAS, AP, M.Si**  
 NIP. 19731123 199402 1 001

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja kegiatan selama tahun 2021-2024 dapat dicapai dengan baik.

Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2024 tertuang dalam kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:**

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meliputi Kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 136.769.300,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.843.900,- atau capaian sebesar 91,28%
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Kinerja SKPD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 29.851.400,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.988.000,- atau capaian sebesar 93,76%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meliputi Kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.673.730.811,- terlaksana 104,55% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.555.501.192,- atau capaian sebesar 95,58%.
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 181. 508.430,- terlaksana 101,67% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.710.074,- atau capaian sebesar 93,50%
  - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan Pagu Dana sebesar Rp. 19.508.500,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.712.000,- atau capaian sebesar 65,16%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meliputi kegiatan:
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan Pagu Dana sebesar Rp. 27.535.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.490.000,- atau capaian sebesar 99,83%.
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 170.344.650,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.913.250,- atau capaian sebesar 89,77%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Meliputi Kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Dana sebesar Rp. 27.284.900,- terlaksana 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.350.000,- dengan capaian sebesar 89,24%.
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Dana sebesar Rp. 596.983.100,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 564.507.500,- atau capaian sebesar 94,56%.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Dana sebesar Rp. 38.602.200,- terlaksana 80% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.981.400,- atau capaian sebesar 80,26%.
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 488.102.700,- terlaksana 100% dengan



- realisasi anggaran sebesar Rp. 449.780.250,- atau dengan capaian sebesar 92,15%.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 471.009.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 433.153.000,- atau dengan capaian sebesar 91,96%.
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Pagu Dana sebesar Rp. 88.500.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.343.000,- dengan capaian sebesar 97,56%.
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 441.897.000,- Terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 368.285.000,- atau dengan capaian sebesar 83,34%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Kegiatan:
    - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.905.000.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.860.600.000,- atau dengan capaian sebesar 97,67%.
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Dana sebesar Rp. 745.679.540,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 667.066.416,- atau dengan capaian sebesar 89,46%.
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Kegiatan:
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Dana sebesar Rp. 4.000.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dengan capaian sebesar 100%.
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu Dana sebesar Rp. 99.556.600,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.716.260,- atau dengan capaian sebesar 82,51%.
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu Dana sebesar Rp. 206.191.776,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.689.421,- atau dengan capaian sebesar 61,44%.
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Kegiatan:
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 466.353.222,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.652.555,- atau dengan capaian sebesar 52,25%.
    - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 143.240.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.889.300,- dengan capaian sebesar 39,02%.
    - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya dengan Pagu Dana sebesar Rp. 243.332.180,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 197.388.050,- atau dengan capaian sebesar 81,12%.
    - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Pagu Dana sebesar Rp.

- 27.070.000,- terlaksana 37,93% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.901.500,- atau dengan capaian sebesar 55,05%.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Meliputi Kegiatan:
    - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 14.209.965.999,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.928.531.404,- atau dengan capaian sebesar 98,02%.
    - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 208.075.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.545.500,- atau dengan capaian sebesar 95,90%.
    - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 26.400.000,- terlaksana 50% dikarenakan hanya beberapa saja yang melakukan Medical Check Up. Dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 14.092.650,- atau dengan capaian 53,38%.
  9. Layanan Administrasi DPRD Meliputi Kegiatan:
    - a. Fasilitas Fraksi DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 158.784.768,- terlaksana 97,92% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.520.428,- atau dengan capaian sebesar 89,13%.
    - b. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 681.906.160,- terlaksana 101,18% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 638.082.670,- dengan capaian sebesar 93,57%.
    - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 237.037.272,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.619.335,- dengan capaian sebesar 81,68%.

## II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:

10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Meliputi Kegiatan:
  - a. Penyusunan dan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.779.550,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.111.150,- atau dengan capaian sebesar 39,98%.
  - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 3.110.933.530,- terlaksana 133,33% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.962.652.186,- dengan capaian sebesar 95,23%
  - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan dengan Pagu Dana Sebesar Rp. 36.475.000,- terlaksana 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.734.800,- atau dengan capaian sebesar 81,52%.
  - d. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan / atau Naskah Akademik dengan Pagu Dana sebesar Rp. 111.131.700,- terlaksana 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.619.500,- atau dengan capaian sebesar 51,85%.
  - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 76.630.250,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.148.200,- atau dengan capaian sebesar 82,41%.
11. Pembahasan Kebijakan Anggaran Meliputi Kegiatan:
  - a. Pembahasan KUA dan PPAS dengan Pagu Dana sebesar Rp. 283.798.926,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.463.207,- dengan capaian sebesar 95,65%.
  - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan Pagu Dana sebesar Rp.170.299.850,- terlaksana 100% dengan

- realisasi anggaran sebesar Rp. 155.339.360,- atau dengan capaian sebesar 91,22%.
- c. Pembahasan APBD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.079.573.172,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 923.781.295,- atau dengan capaian sebesar 85,57%.
  - d. Pembahasan Perubahan APBD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 669.882.100,- terlaksana 100% dengan realisasi sebesar Rp. 606.837.692,- atau dengan capaian sebesar 90,59%.
  - e. Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.201.804.650,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.193.063.458,- dengan capaian sebesar 98,37%.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Meliputi Kegiatan:
- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum dengan Pagu Dana sebesar Rp. 30.344.700,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.672.940,- dengan capaian sebesar 68,13%.
  - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan Pagu Dana sebesar Rp. 16.569.700,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian sebesar 0%.
  - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pagu Dana sebesar Rp. 16.569.800,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian sebesar 0%.
  - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan Pagu Dana sebesar Rp. 15.569.750,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian sebesar 0%.
  - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam dengan Pagu Dana sebesar Rp. 15.569.650,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian sebesar 0%.
  - f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 15.569.950,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.298.770,- atau dengan capaian sebesar 25,94%.
  - g. Pengawasan Pengguna Anggaran dengan Pagu Dana sebesar Rp. 15.569.950,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian sebesar 0%.
  - h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 790.589.750,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 776.208.017,- atau dengan capaian sebesar 98,18%.
13. Peningkatan Kapasitas DPRD Meliputi Kegiatan :
- a. Orientasi DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 318.454.500,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.590.500,- dengan capain sebesar 96,90%.
  - b. Pendalaman Tugas DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.654.843.926,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.557.842.664,- dengan capain sebesar 96,35%.
  - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan Pagu Dana sebesar Rp. 78.000.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.000.000,- atau dengan capaian sebesar 92,31%.

- c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan Pagu Dana sebesar Rp. 204.000.000,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.196.500.000,- atau dengan capaian sebesar 96,32%.
  - d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan Pagu Dana sebesar Rp. 118768.300,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.136.900,- atau dengan capaian sebesar 70%,
  - e. Penyusunan Program Kerja DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 92.003.450,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.89.706.650,- atau dengan capaian sebesar 97,50%.
  - f. Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 141.671.400,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 136.532.400,- atau dengan capaian sebesar 96,37%.
14. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Meliputi Kegiatan :
- a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 304.695.184,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 228.762.276,- atau dengan capaian sebesar 94,33%.
  - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 22.093.250,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.767.310,- atau dengan capaian sebesar 89,47%.
  - c. Pelaksanaan Reses dengan Pagu Dana sebesar Rp. 709.682.134,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 591.488.156,- atau dengan capaian sebesar 83,35%.
15. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Meliputi Kegiatan :
- a. Penyusunan Kode Etik DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 201.396.350,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.486.650,- atau dengan capaian sebesar 74,23%.
  - b. Pengawasan Kode Etik DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 37.010.700,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian sebesar 0%.
16. Fasilitasi Tugas DPRD Meliputi Kegiatan:
- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 8.964.508.372,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.684.708.906,- atau dengan capaian sebesar 96,89%
  - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp.19.011.850,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.752.500,- atau dengan capaian sebesar 77,60%.
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dengan Pagu Dana sebesar Rp. 126.540.000,- terlaksana 80% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.625.000,- atau dengan capaian sebesar 93,75%.
  - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.096.708.816,- terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.047.579.786,- dengan capaian sebesar 95,52%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD  
Sekretariat DPRD menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD baik Sebagai Perencanaan Penyusunan Legalisasi Daerah, Fungsi Pengawasan Serta tugas- tugas dan fungsi DPRD lainnya.
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD  
Sekretariat DPRD memfasilitasi Perencanaan Kebutuhan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD.
3. Fasilitas Penyelenggaraan Rapat DPRD  
Sekretariat DPRD memfasilitasi rapat-rapat, yang terdiri dari : Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat- rapat Paripurna, Rapat- rapat DPRD lainnya dan Rapat- rapat Pembahasan Ranperda.
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD  
Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi Pengadaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD/Alat- alat Kelengkapan DPRD.
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan  
Pencapaian Kinerja pelayanan pada Sekretariat DPRD secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:
  1. Indeks Kepuasan AKD  
Target Pada Tahun 2024 : 3,55  
Realisasi Capaian Tahun 2024 : 3,08 (86,76%)
  2. Nilai Akuntabilitas Kinerja  
Target Pada Tahun 2024 : BB (75)  
Realisasi Capaian Tahun 2024 : B (69,40) atau 92,53%

Faktor – Faktor Pendorong dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD adalah :

1. Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada Kegiatan-kegiatan DPRD yang sudah teragenda dan terjadwal dalam hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD.
2. Target pembahasan dan penyelesaian ranperda sudah ada di propemperda.
3. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD
4. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi
5. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang

Faktor – Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD adalah :

1. Sering terlambatnya Dokumen – Dokumen Pembahasan diserahkan oleh Pemerintah (Perangkat Daerah terkait) ke Sekretariat DPRD.
2. Dalam tahapan pembahasan ranperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur.

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat Pada Tabel TC.30:

Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

| Sasaran                                                            | Indikator                                                                              | Satuan | Target Renstra SKPD |      |      |      |      |      |      |       | Realisasi Capaian |       |       |       | Proyeksi |      |  | Catatan<br>Analisis |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|----------|------|--|---------------------|
|                                                                    |                                                                                        |        | 2021                | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022  | 2023              | 2024  | 2023  | 2024  | 2025     | 2026 |  |                     |
|                                                                    |                                                                                        |        |                     |      |      |      |      |      |      |       |                   |       |       |       |          |      |  |                     |
| 1                                                                  | 2                                                                                      | 3      | 5                   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12    | 13                | 14    | 15    | 16    | 17       |      |  |                     |
| Terwujudnya<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>DPRD | Tingkat Kepuasan<br>Anggota DPRD<br>terhadap Pelayanan<br>Sekretariat DPRD<br>(Indeks) | Indeks | 3,4                 | 3,45 | 3,51 | 3,55 | 3,6  | 3,65 | 3,41 | 3,46  | 3,51              | 3,08  | 3,51  | 3,08  | 3,5      | 3,55 |  |                     |
|                                                                    |                                                                                        |        |                     |      |      |      |      |      |      |       |                   |       |       |       |          |      |  |                     |
| Meningkatnya<br>Akuntabilitas<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah       | Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                | Angka  | 67                  | 69   | 70   | 75   | 78   | 80   | 7,20 | 71,62 | 68,80             | 69,40 | 68,80 | 69,40 | 72       | 73   |  |                     |
|                                                                    |                                                                                        |        |                     |      |      |      |      |      |      |       |                   |       |       |       |          |      |  |                     |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan Wewenang DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok meliputi sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Formal, Diklat Fungsional dan Struktural serta Bimbingan Teknis/kursus-kursus singkat.
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan/perancangan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman dengan:

### A. Faktor Strategi Eksternal

#### 1. Peluang yang dapat dimanfaatkan

- Dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- Kesepakatan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia.
- Peran dan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Legislasi Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran.

#### 2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi:

- Perubahan Peraturan Perundangan yang berdampak Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan Perencanaan Legislasi serta tugas dan fungsi DPRD yang lainnya tidak konsisten.
- Terdapatnya ketidakselarasan antara Peraturan Perundang-undangan tentang Legislasi Daerah serta tugas dan fungsi DPRD lainnya.

### B. Faktor Strategi Internal

#### 1. Kekuatan yang bisa digunakan

- Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok sebagai sistem pendukung DPRD Kabupaten Solok.
- Ketersediaan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.
- Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam Perencanaan Penyusunan Legislasi.
- Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Solok.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan
  - Kelembagaan pendukung DPRD yang belum optimal.
  - Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai dan kurangnya Kompetensi Sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah:

1. Optimalisasi fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok melalui perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD serta peningkatan dan pembaruan sistim teknologi informasi;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Solok melalui pemanfaatan dan pembaruan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi serta pembinaan tim yang solid untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
3. Peningkatan komitmen dan mengakomodir terhadap kegiatan kesekretariatan dalam memfasilitasi Alat Kelengkapan DPRD.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Sekretariat. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen Rencana Kinerja Sekretariat DPRD memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator Kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada Sekretariat DPRD bukan merupakan SKPD Teknis yang langsung turun kemasyarakat berupa kegiatan, tapi merupakan SKPD yang bertugas memfasilitasi kegiatan DPRD jadi tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang akan dilakukan penelaahan.

Tabel TC.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                               |            |                                                                       |                |                   | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                      |            |                                                                       |        |                   | CATATAN<br>PENTING |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| No                  | PROGRAM/KEGIATAN                                              | LOKASI     | INDIKATOR KINERJA                                                     | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF    | PROGRAM/KEGIATAN                                              | LOKASI     | INDIKATOR KINERJA                                                     | TARGET | KEBUTUHAN DANA    |                    |
| -1                  | -2                                                            | -3         | -4                                                                    | -5             | -6                | -7                                                            | -8         | -9                                                                    | -10    | -11               | -12                |
| 1                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Kab. Solok | Persentase pemenuhan layanan kesehatan                                | 100%           | Rp24.123.555.845  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Kab. Solok | Persentase pemenuhan layanan kesehatan                                | 100%   | Rp28.251.016.795  |                    |
| 2                   | PROGRAM DURUNGAN PELAKSANAAN TUJAS DAN FUNGSI DPRD            | Kab. Solok | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana | 100%           | Rp18.710.722.624  | PROGRAM DURUNGAN PELAKSANAAN TUJAS DAN FUNGSI DPRD            | Kab. Solok | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana | 100%   | Rp32.745.875.301  |                    |
|                     |                                                               |            |                                                                       |                | Rp 43.837.279.449 |                                                               |            |                                                                       |        | Rp 61.048.192.096 |                    |

Sekretaris DPRD  
  
Drs. ZAITUL KHLIS, AP, M.Si  
NIP. 19731125 199402 1 001

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar Penyelenggaraan Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Visi Presiden periode 2025 – 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 telah menetapkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Solok.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2023 tentang Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

yang memiliki peran penting untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Solok.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Solok yaitu Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sebagai penjabaran dari setiap Misi dan serta Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025- 2029 maka perlu tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

| No | Tujuan                                         | Sasaran                                                   | Indikator Tujuan/Sasaran                                                   |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                                                         | 4                                                                          |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | 1. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks) |
|    |                                                | 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)                                       |

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang telah

ditetapkan. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2026 adalah :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:**

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
  - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
  - d. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu.
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan atau Perorangan
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
  - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
  - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

10. Layanan Administrasi DPRD.
  - a. Fasilitasi Fraksi DPRD.
  - b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
  - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.
- II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:**
  11. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
    - a. Penyusunan dan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
    - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
    - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan.
    - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
    - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
  12. Pembahasan Kebijakan Anggaran.
    - a. Pembahasan KUA dan PPAS.
    - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
    - c. Pembahasan APBD.
    - d. Pembahasan Perubahan APBD.
    - e. Pembahasan Laporan Semester.
    - f. Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
  13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
    - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum.
    - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
    - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
    - d. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian.
    - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam.
    - f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
    - g. Pengawasan Pengguna Anggaran.
    - h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
  14. Peningkatan Kapasitas DPRD.
    - a. Orientasi DPRD
    - b. Pendalaman Tugas DPRD.
    - c. Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
    - d. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
    - e. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
    - f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
    - g. Penyusunan Program Kerja DPRD.
  15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
    - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
    - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
    - c. Pelaksanaan Reses.
  16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.
    - a. Penyusunan Dokumen Kode Etik
    - b. Pengawasan Kode Etik DPRD.
  17. Pembahasan Kerjasama Daerah
    - a. Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
  18. Fasilitasi Tugas DPRD.
    - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
    - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
    - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
    - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

**BAB IV.**  
**RENCANA KERJA DAN**  
**PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat Program yang akan dilaksanakan serta Pagu Indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025- 2029 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2026.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah diterapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja digunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, Merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

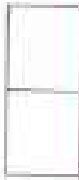
Rencana kerja program dan Kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel TC.33 berikut:







| 3. PROGRAM BUKU/BUKLAH RELIGIUS/ALAM TOTAL DAN YOUTH DPOD |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab yang         |  | 18.713.793.884 |  | 26.994.170.912 |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 10. Pembinaan Pastoran Daerah dan Pastoran DPOD           |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau             |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 1. Pembinaan Pastoran Daerah                              |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 2. Pembinaan Pastoran DPOD                                |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 3. Pembinaan Pastoran DPOD                                |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 4. Pembinaan Pastoran DPOD                                |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 5. Pembinaan Pastoran DPOD                                |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 6. Pembinaan Pastoran DPOD                                |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 7. Pembinaan Pastoran DPOD                                |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 8. Pembinaan Pastoran DPOD                                |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 11. Pembinaan Religi/Alam                                 |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 1. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 2. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 3. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 4. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 5. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 6. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 7. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 8. Pembinaan Religi/Alam                                  |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 12. Pembinaan Pengembangan Pastoral                       |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 1. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 2. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 3. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 4. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 5. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 6. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 7. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |
| 8. Pembinaan Pengembangan Pastoral                        |  | Pembinaan dan/atau Pelaksanaan Program Pastoral dan/atau Pelaksanaan |  | 100%           |  | 100%           |  |







Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai gambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun depan, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan secara umumnya juga penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ini dibuat atau disusun untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD guna untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD yang telah dibuat untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

**SEKRETARIS DPRD,**



**Drs. ZAITUL IKHLAS, AP, M.Si**  
NIP. 19731125 199402 1 001